



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN MUARA JAWA

2025

SELAMAT DATANG DI
KANTOR KECAMATAN MUARA JAWA

BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa

Alamat : Jln. Ir. Soekarno No. 58 Kel. Muara Jawa Ulu
Website : www.muarajawa.id
e-mail: kecmuarajawa2020@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Muara Jawa Tahun 2021 - 2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Muara Jawa Tahun 2021 - 2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Muara Jawa. Kinerja Kecamatan Muara Jawa diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Muara Jawa pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.



Pada akhirnya laporan ini kiranya dapat memberi manfaat yang optimal bagi peningkatan kinerja dimasa mendatang dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi khususnya Kecamatan Muara Jawa Semoga LKjIP Kecamatan Muara Jawa ini juga dapat berguna sebagaimana mestinya.

Kutai Kartanegara, 28 Februari 2026





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	iii	
DAFTAR TABEL	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Gambaran Umum Perangkat Daerah	2
	1.4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	4
	1.5. Isi – isu strategis	16
	1.6. Sumber Daya Manusia	17
	1.7. Sumber Daya Keuangan	21
	1.8. Sistematika Laporan Kinerja	22
BAB II	PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	24
	2.1. Perencanaan Kinerja	24
	2.1.1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah	25
	2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	25
	2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan	28
	2.1.4. Indikator Kinerja Utama	30
	2.2. Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2025	34
	2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	40
	2.4. Alokasi Anggaran Tahun 2025	45
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	50
	3.1. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	52
	3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	52



3.1.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya	78
3.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis	84
3.1.4	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain	88
3.1.5	Analisis Keberhasilan, Kegagalan Indikator Kinerja dan Solusi	89
3.1.6	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	97
3.1.7	Realisasi Anggaran tahun 2025	105
BAB IV	PENUTUP	109
4.1	Penutup	109
	LAMPIRAN	ix
	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administratif Kecamatan Muara Jawa	3
Tabel 1.1	Luas wilayah dan Jumlah Kelurahan berdasarkan Kelurahan	3
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Muara Jawa per 31 Desember 2025	4
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
Tabel 1.3	PNS berdasarkan Pendidikan	17
Tabel 1.4	PNS berdasarkan Golongan	18
Tabel 1.5	PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang	18
Tabel 1.6	PNS berdasarkan Jabatan	19
Tabel 1.7	PNS berdasarkan Jenis dan Kelas Jabatan	20
Tabel 1.8	Anggaran Tahun 2025	21
Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026	26
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	27
Tabel 2.3	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025	28
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama	31
Tabel 2.5	Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025	35



Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025	41
Tabel 2.7	Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026	42
Tabel 2.8	Alokasi Anggaran Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025	45
Tabel 2.9	Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025	46
Tabel 2.10	Alokasi Anggaran Per Sasaran 2025	46
Tabel 2.11	Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan 2025	46
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	51
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Muara Jawa tahun 2025	52
Tabel 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan Tahun 2025	65
Tabel 3.4	Realisasi Indikator Sasaran Utama A1 Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025	67
Tabel 3.5	Realisasi Indikator Sasaran Utama A2 Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025	68
Tabel 3.6	Realisasi Indikator Sasaran Utama A3 Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025	69
Tabel 3.7	Realisasi Indikator Sasaran Tambahan B1 Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025	70



Tabel 3.8	Realisasi Indikator Sasaran Tambahan B2 Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025	71
Tabel 3.9	Realisasi Indikator Sasaran Tambahan B3 Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025	72
Tabel 3.10	Realisasi Indikator Sasaran Tambahan B4 Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025	73
Tabel 3.11	Realisasi Indikator Sasaran Tambahan B5 Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025	74
Tabel 3.12	Realisasi Indikator Sasaran Tambahan B6 Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025	74
Tabel 3.13	Realisasi Indikator Sasaran Tambahan B7 Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025	75
Tabel 3.14	Realisasi Indikator Sasaran Tambahan B8 Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025	76
Tabel 3.15	Realisasi Indikator Sasaran Tambahan B9 Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025	77
Tabel 3.16	Realisasi Indikator Sasaran Tambahan B10 Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025	78
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya	79
Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya	80



Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	81
Tabel 3.20	Perbandingan Antara Target Renstra dan Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025	84
Tabel 3.21	Perbandingan Nilai IKM Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 dengan Kecamatan Lain di Tingkat Nasional	88
Tabel 3.22	Tingkat Kemajuan Capaian Rencana Strategis Tahun 2025	89
Tabel 3.23	Faktor Pendukung Dan Penghambat Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025	91
Tabel 3.24	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Kinerja dan anggaran program Tahun 2025	98
Tabel 3.25	Realisasi Anggaran dan kegiatan 2025	106



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Rangkaian sistemik tersebut meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kecamatan Muara Jawa telah menyusun:

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Muara Jawa Tahun 2016-2021;
- (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025;
- (3) Perubahan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025;
- (4) Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025;
- (5) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025;
- (6) Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025; dan
- (7) Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi perangkat daerah diwajibkan menyusun laporan kinerja.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.



Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Muara Jawa.
2. Mendorong Kecamatan Muara Jawa di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Muara Jawa untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Muara Jawa di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Wilayah Kecamatan Muara Jawa yang terbentuk pada tahun 1962 dan termasuk dalam wilayah Kotamadya Samarinda. Kemudian pada tahun 1988 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 masuk ke wilayah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.



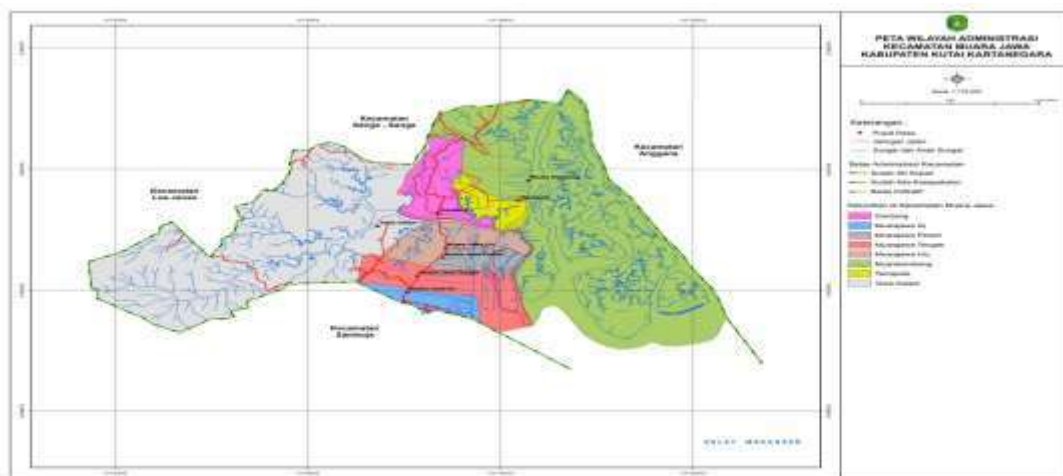
Kecamatan Muara Jawa secara geografis adalah daerah pesisir yang kaya dengan hasil bumi terutama minyak bumi, gas alam, dan batu bara serta sumber daya alam lainnya seperti perikanan. Kecamatan Muara Jawa merupakan salah satu daerah penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kabupaten Kutai Kartanegara. Terletak di muara Sungai Mahakam atau biasa disebut Delta Mahakam. Secara Geografis, Kecamatan Muara Jawa berada pada posisi: 117' – 118' Bujur Timur, 50' Lintang Selatan. Wilayah Kecamatan Muara Jawa berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sanga-Sanga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Muara Jawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Anggana dan Selat Makassar.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan

Luas wilayah Kecamatan Muara Jawa sekitar 619,16 KM² terdiri dari 8 Kelurahan.

Gambar 1.1. Peta Wilayah Administratif Kecamatan Muara Jawa



Dengan luas wilayah kelurahan di kecamatan Muara Jawa sebagai berikut:

Tabel 1.1. Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Muara Jawa.

No	Nama Desa	Luas Wilayah	
		Desa/ Kelurahan (Km2)	Jumlah RT
1	Muara Jawa Ilir	13.41656151	22
2	Muara Jawa Tengah	39.789605	20
3	Muara Jawa Ulu	27.363963	41
4	Teluk Dalam	215.936153	7
5	Muara Jawa Pesisir	12.604432	32
6	Dondang	30.51568	14
7	Tama Pole	15.177166	3



Luas Wilayah			
No	Nama Desa	Desa/ Kelurahan (Km2)	Jumlah RT
8	Muara Kembang	261.009965	15
TOTAL		619.162297	154

Sumber Data: Seksi Pemerintahan Kecamatan Muara Jawa, 31 Desember 2025.

Jumlah penduduk mencapai 40.096 jiwa (Laporan Penduduk) dan Jumlah KK 12.861, Adapun persebaran jumlah penduduk Kecamatan Muara Jawa kelurahan:

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Muara Jawa per 31 Desember Tahun 2025

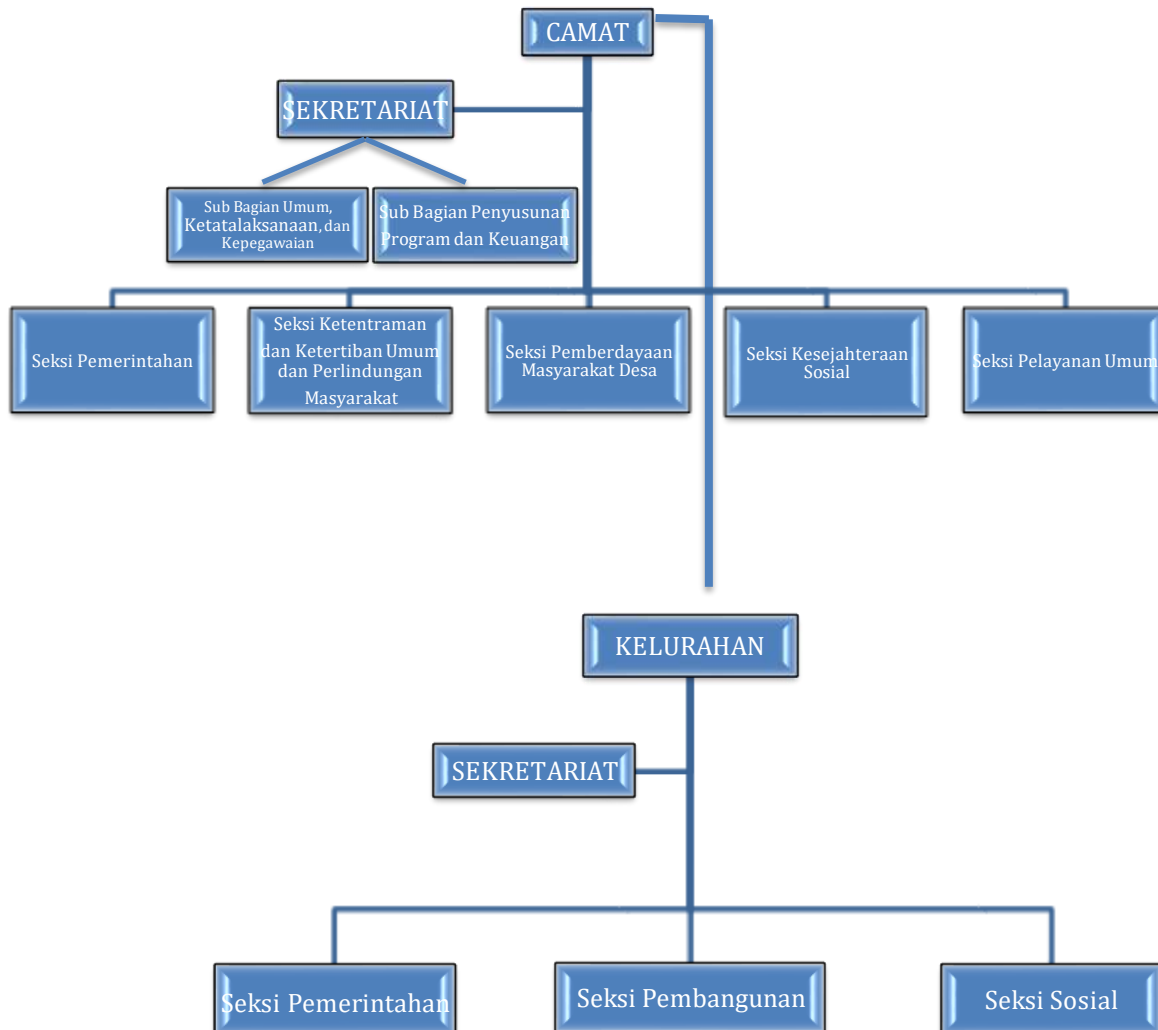
NO.	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	L + P	KK
1	Muara Jawa Ilir	2.008	1.813	3.821	1.179
2	Muara Jawa Tengah	2.776	2.532	5.308	2.033
3	Muara Jawa Ulu	5.871	5.974	11.845	4.236
4	Teluk Dalam	473	438	911	309
5	Muara Jawa Pesisir	5.922	5.434	11.356	3.232
6	Dondang	1.368	1.316	2.684	743
7	Tama Pole	275	238	513	145
8	Muara Kembang	1.870	1.788	3.658	984
JUMLAH		20.563	19.533	40.096	12.861

Sumber Data: Seksi Pemerintahan Kecamatan Muara Jawa, 31 Desember 2025.

1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pembentukan Kecamatan Muara Jawa berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan struktur organisasi diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan. Struktur organisasi Kecamatan Muara Jawa dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut :

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Kecamatan Muara Jawa



Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang bertindak sebagai pelaksana teknis kewilayahan dan mempunyai wilayah kerja tertentu serta dipimpin oleh seorang Camat.

Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kecamatan merupakan suatu kesatuan dan saling terkait antara tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, menyebutkan :

Camat mempunyai Tugas menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.



b. Fungsi Kecamatan

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan terdiri dari:

1. Sekretariat,
 - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Kelurahan membawahkan :
 - a. Sekretaris;
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Pembangunan; dan
 - d. Seksi Sosial.



Camat Mempunyai Tugas Meliputi :

1. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan kecamatan;
2. Merumuskan rencana strategis serta kebijakan operasional dibidang tugas pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
3. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraab ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
6. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan administrasiterpadu kecamatan (PATEN), pelayanan masyarakat yangmenjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapatdilaksanakan pemerintahan Desa atau kelurahan danpenanggulangan bencana;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian program dan kegiatan di tingkat kecamatan;
8. Membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;
9. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Camat;
10. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, menginventarisir, mengidentifikasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum,Pemberdayaan masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum serta membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Kecamatan; dan



11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Sekretaris Camat Mempunyai Tugas Meliputi :

1. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/ jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi dan;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;
8. mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
9. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU,



- LHKPN dan/ atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sanksi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/ jasa;
 11. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat; dan
 12. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian adalah:

1. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. Menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD
5. Merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem 'penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;
6. Merencanakan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja;
7. Merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan



- gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Merencanakan pelaksanaan administrasi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang / jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 9. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 10. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan :

1. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD melaporkan ke Camat melalui sekretaris;
4. Merencanakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), LKPJ dan LKPD;
5. Menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM)
6. Menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan
7. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
8. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan



dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan; dan merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Seksi Pemerintahan

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. menyusun rencana kegiatan urusan Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi pertanahan dan kependudukan dan catatan sipil yang menjadi urusan Kecamatan;
4. merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan serta peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dan atau kelurahan;
5. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang pertanahan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
6. merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penganalisisan materi peraturan desa dan keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati;
7. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan serta pembinaan penyusunan monografi desa dan atau kelurahan;
8. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan atau kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pembentukan Rukun Tetangga;
9. merencanakan kegiatan, mengidentifikasi dan memfasilitasi pemekaran desa/kelurahan, penataan maupun perselisihan batas wilayah antar desa dan atau kelurahan serta penyelesaian pengaduan masalah pertanahan dalam wilayah Kecamatan;
10. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa;
11. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemerintahan;
12. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemerintahan;



13. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan; dan
14. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. menyusun rencana kegiatan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merencanakan kegiatan, menginventarisir, melakukan pembinaan dan mengevaluasi permasalahan ketentraman dan ketertiban serta melakukan koordinasi dengan unit terkait yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Desa/ kelurahan;
4. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan proses administrasi perijinan bidang Politik Dalam Negeri / Izin Gangguan (HO) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
5. merencanakan kegiatan, melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat tingkat Kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang serta data WNI keturunan dan WNA;
7. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan umat beragama;
8. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan Pengungsi;
9. merencanakan kegiatan melakukan pencegahan atas penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya serta pengelolaan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;



10. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
11. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
12. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
13. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

Uraian Tugas Seksi Pemerdayaan Masyarakat Desa

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merencanakan kegiatan dan menyelenggarakan proses administrasi yang meliputi perijinan bidang pertanian, pertambangan,
4. perindustrian, perdagangan, Izin Mendirikan Bangunan dan Pariwisata yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
5. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta, prakarsa, dan swadaya gotong royong masyarakat serta pemberdayaan peranan wanita;
6. merencanakan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata;
7. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) dan Air Bersih Perdesaan; merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi rencana tata ruang;
8. merencanakan kegiatan, melakukan pemantauan pelaksanaan penghijauan, konservasi tanah dan air;
9. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;
10. merencanakan kegiatan, menghimpun, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum; 10. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian



Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

11. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
13. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Seksi Kesejahteraan Sosial

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. menyusun rencana kegiatan urusan Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
4. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang ketenagakerjaan AK/ 1 (Pencari Kerja Swasta) dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
5. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi program yang meliputi bantuan sosial, organisasi social kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan, kesejahteraan keluarga, peranan wanita dan organisasi kewanitaan;
7. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkoba dan penyandang masalah sosial;
8. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembanganl kepramukaan, karang taruna, organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
9. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan;



10. merencanakan kegiatan, menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana / prasarana peribadatan dan kehidupan beragama;
11. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Kesejahteraan Sosial;
12. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kesejahteraan Sosial;
13. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan Kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesejahteraan sosial; dan
14. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Seksi Pelayanan Umum

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. menyusun rencana kegiatan urusan Pelayanan Umum sebagaipedoman pelaksanaan tugas;
3. merencanakan kegiatan, meneliti, melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perijinan dan menetapkan besaran retribusi serta berkoordinasi dengan instansi terkait tentang pelayanan perijinan dan non perijinan;
4. merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan umum, memfasilitasi dan melakukan pungutan atas pembinaan, pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan, pertamanan dan pemakaman;
5. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi perijinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
6. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman;
7. merencanakan kegiatan, menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan desa/kelurahan serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa;
8. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;



9. merencanakan kegiatan, menghimpun, memantau, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
10. merencanakan kegiatan, melaksanakan sosialisasi pengendalian perizinan perumahan dan bangunan;
11. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pelayanan Umum;
12. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pelayanan Umum;
13. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Umum; dan
14. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

1.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu Strategis Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Muara Jawa dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Rendahnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah
2. Rendahnya kualitas pelayanan publik
3. Rendahnya aksesibilitas antar dan inter wilayah

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja dilingkungan Kecamatan Muara Jawa dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya tertib administrasi di Kelurahan dan Kecamatan
2. Belum optimalnya waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan/SOP
3. Belum optimalnya realisasi Pembangunan antara hasil musrenbang dengan realisasi pembangunan infrastuktur/fisik.
4. Belum optimalnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan.
5. Rendahnya tingkat swadaya murni masyarakat dibidang pembangunan.
6. Rendahnya kapasitas sumber daya aparatur.
7. Belum adanya indikator yang tetap dalam penetapan skala prioritas pembangunan.



Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pemerintahan Kecamatan Muara Jawa adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap Tugas Pokok.
2. Belum optimalnya sistem pelaporan kecamatan dan kelurahan secara rutin/berkala.
3. Lemahnya pengawasan internal pemerintah/belum optimalnya SPIP
4. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi berbasis elektronik, baik dalam mendukung kinerja pelayanan publik maupun operasional SKPD.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja SKPD yang memiliki tugas pokok menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Muara Jawa, antara lain:

1. Jumlah dan kapasitas aparatur belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai antara beban kerja dengan kompetensi.
2. Masih lemahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan mengakibatkan tidak maksimalnya koordinasi antar seksi.
3. Pola pembinaan aparatur yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme pola kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Muara Jawa, antara lain:

1. Pelimpahan kewenangan kepada Camat tidak sepenuhnya didukung oleh pembinaan dari dinas teknis dan personil, peralatan dan pembiayaan.
2. Kurang SDM di tingkat kewilayahan.

1.6 Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur Kecamatan Muara Jawa per 31 Desember 2025 sebanyak 147 orang terdiri atas 70 ASN dan 77 Non ASN. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.3. PNS berdasarkan Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	PEGAWAI		JUMLAH
		ASN	NON ASN	
1	S.3	0	0	0



NO.	PENDIDIKAN	PEGAWAI		JUMLAH
		ASN	NON ASN	
2	S.2	12	0	12
3	S.1	43	27	70
4	D-IV	0	0	0
5	SM	0	0	0
6	D-III	1	0	1
7	D-II	0	0	0
8	D-I	0	0	0
9	SLTA	13	47	60
10	SLTP	1	0	1
11	SD	0	3	3
JUMLAH		70	77	147

Sumber Data: Subbagian Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Kecamatan Muara Jawa, Desember 2025.

b. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.4. PNS berdasarkan Golongan

No	GOLONGAN	PEGAWAI		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	I	0	0	0
2	II	5	11	16
3	III	17	27	44
4	IV	8	2	10
5	NON ASN	27	50	77
JUMLAH		57	90	147

Sumber Data: Subbagian Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Kecamatan Muara Jawa, Desember 2025.

c. ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

Tabel 1.5. ASN berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

NO.	PANGKAT	GOL. RUANG	PEGAWAI		JUMLAH
			PRIA	WANITA	
1	Juru Muda	I/a	0	0	0
	Juru Muda TK I	I/b	0	0	0
	Juru	I/c	0	0	0
	Juru TK I	I/d	0	0	0
II	Pengatur Muda	II/a	0	0	0
	Pengatur Muda TK. I	II/b	1	0	1



NO.	PANGKAT	GOL. RUANG	PEGAWAI		JUMLAH
			PRIA	WANITA	
	Pengatur	II/c	0	3	3
	Pengatur TK. I	II/d	4	7	11
III	Penata Muda	III/a	1	9	10
	Penata Muda TK. I	III/b	4	8	12
	Penata	III/c	1	6	7
	Penata TK.I	III/d	7	9	16
IV	Pembina	IV/a	8	2	10
	Pembina TK. I	IV/b	0	0	0
	Pembina Utama Muda	IV/c	0	0	0
	Pembina Utama Madya	IV/d	0	0	0
	Pembina Utama	IV/e	0	0	0
JUMLAH			26	44	70

Sumber Data: Subbagian Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Kecamatan Muara Jawa, Desember 2025.

d. ASN Berdasarkan Jenis Jabatan

Tabel 1.6. ASN berdasarkan Jabatan

NO.	ESSELON	PEGAWAI		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	I	0	0	0
2	II	0	0	0
3	III/a	1	0	1
4	III/b	1	0	1
5	IV/a	9	3	12
6	IV/b	12	18	30
7	V			
	JUMLAH ESSELON	23	21	44
	JF	0	0	0
	NON ESSELON	7	19	26
	TOTAL JUMLAH	30	40	70

Sumber Data: Subbagian Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Kecamatan Muara Jawa, Desember 2025.



e. Data pegawai berdasarkan jenis dan kelas jabatan

Tabel 1.7. PNS berdasarkan Jenis dan Kelas Jabatan

NO.	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH ORANG
1	2	3	4
1. PNS			
	Jabatan Administrator	12	1
	Jabatan Administrator	11	1
	Jabatan Pengawas	9	12
	Jabatan Pengawas	8	30
	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	2
	Pengadministrasi Perkantoran	5	5
	Pengelola Layanan Operasional	6	2
	Pengolah Data dan Informasi	6	14
	Penelaah Teknis Kebijakan	7	3
	JUMLAH PNS		70
2. PPPK			
	Penata layanan Operasional	7	25
	Pengadministrasi Perkantoran	5	37
	Pengelola Umum Operasional	1	1
	Pengelola Umum Operasional (Tahap II)	1	2
	Penata layanan Operasional (TAHAP II)	7	1
	Penata layanan Operasional (PARUH WAKTU)	7	1
	Pengadministrasi Perkantoran (TAHAP II)	5	10
3. THL			
	Petugas kebersihan (Kecamatan)		0
	Petugas kebersihan (Kelurahan)		0
	Penjaga Malam (Kecamatan)		0
	Penjaga Malam (Kelurahan)		0



NO.	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH ORANG
	JUMLAH PPPK DAN THL		77
	JUMLAH PEGAWAI		147

Sumber Data: Subbagian Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Kecamatan Muara Jawa, Desember 2025.

1.7 Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Jawa pada Tahun 2025 berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada APBD Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Muara Jawa mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.83.818.183.778,00 yang terdiri atas belanja langsung dan belanja tak langsung serta untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program pendukung dengan rincian 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan.

Tabel 1.8. Anggaran Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.840.844.330
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	181.340.540
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.831.887.435
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	233.637.500
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.177.079.331
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	413.155.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.011.560.024
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	992.184.500
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.451.441.788



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	380.121.850
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	40.071.319.938
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.659.702.710
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.104.174.460
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	14.555.528.250
7.01.03	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	172.557.500
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	172.557.500
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	693.637.450
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	693.637.450
	JUMLAH	83.818.183.778

1.8 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Gambaran Umum, Struktur organisasi dan atata kerja, Isu-isu Strategis yang dihadapi perangkat daerah, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Keuangan, dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Strategis Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-984/BAPP/065.11/05/2021 tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Menjadi Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2021 – 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Di dalam Renja Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.



2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

a. VISI

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

b. MISI

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan;

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Muara Jawa mengacu pada Misi ke-1,yaitu:

“Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.



Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara
Tahun 2021 - 2026

N o	Misi	Tujuan Pemda	Indikator Tujuan Pemda	Sasaran Pemda	Indikator Sasaran
1.	Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
2.					Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3.					Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan

Sumber : Renstra Kecamatan Muara Jawa periode 2021-2026

Berdasar pada Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kecamatan Muara Jawa berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu:

- Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan dengan Indikator :



1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti;
2. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan

a. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan Kecamatan Muara Jawa dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka Tujuan yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Jawa adalah Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan Muara Jawa.

b. Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan pada Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Muara Jawa, maka Sasaran yang hendak dicapai terlihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2. 2.

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Muara Jawa Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
			202 2	202 3	202 4	202 5	202 6
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	61	62	64	65	67
	Meningkatnya	Persentase keluhan	55	60	65	70	75



	kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti					
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	82,35	83	84	84	85
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Kecamatan	15	20	25	30	35

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan perangkat daerah merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Muara Jawa Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Efektif Inovatif Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
			3 Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
			4 Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			2 Meningkatkan Pemberdayaan Kelurahan
		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			2 Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peraturan Kepala Daerah
		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan	1 Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

2.1.4 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai kartanegara tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut



Tabel 2. 4.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Muara Jawa

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNGJAWAB
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan adalah Ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil perhitungan atas Survey yang dilaksanakan oleh Kecamatan Muara Jawa terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Acuan yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara	Hasil Survey Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Muara Jawa / Kasi Pelayanan Umum



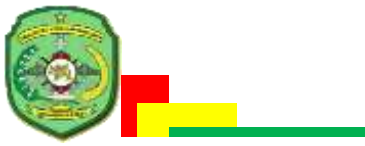
NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB
					pelayanan publik dan Keputusan MENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004	
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan yang Ditindaklanjuti (PKMT) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas penanganan keluhan masyarakat terhadap	Hasil perbandingan jumlah keluhan yang ditangani/ditindaklanjuti atas ketidakpuasan masyarakat pada pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan terhadap total aduan yang disampaikan	Laporan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Muara Jawa / Kasi Pelayanan Umum



NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/R UMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB
				pelayanan kecamatan.		
		Persentase Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Perse n	Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum (PCKKTU) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat capaian ketenteraman dan ketertiban umum di suatu wilayah.	Hasil perbandingan banyaknya kasus gangguan keamanan yang ditangani dan difasilitasi oleh pihak kecamatan terhadap jumlah kasus gangguan keamanan yang dilaporkan di Kecamatan	Laporan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Muara Jawa
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan	Perse n	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan (PPAD-KK) adalah	Nilai Total Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan (N) dikurangi Nilai Total Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya (N-1) dibagi Nilai Total	Tidak lagi diperhitungkan sejak adanya Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 40



NO	TUJUAN / SASARA N STRATE GIS	INDIKAT OR KINERJ A	SAT UAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASI ONAL	FORMULASI/R UMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUN GJAWAB
				ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pertumbuhan pendapat asli daerah kewenangan kecamatan dari tahun ke tahun.	Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya (N-1) dikali 100	Tahun 2018 tentang penyelenggaraan bangunan gedung, penerbitan ijin secara online melalui aplikasi simbg.pu.go.id sehingga tidak ada lagi penerbitan IMB dan pemungutan retribusinya di Kecamatan



2.2 Program/Kegiatan/subkegiatan Tahun 2025

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran pada Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai kartanegara

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
				Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
				dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan/Material
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pengadaan Mebel
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang	Penyediaan Jasa Surat Menyurat



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
			Urusan Pemerintahan Daerah	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
				Instansi Vertikal Terkait
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				Evaluasi Kelurahan
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan



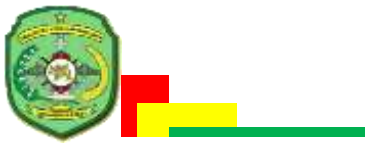
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Sumber : Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada tabel 2.6 berikut



Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai kartanegara
Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	TUJUAN			
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	65
	SASARAN			
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	70
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	84
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan	Persen	30
2	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKPJ)	Persen	100
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
6	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100



NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Presentase Keterinputan Data Pada Satu Data Indonesia	Persen	100
9	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
10	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
11	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65

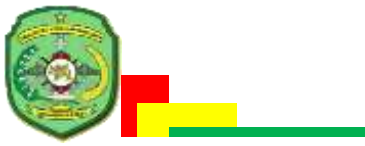
Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025

Pada Tabel di atas Tahun 2025 terdapat 1 (satu) indikator dan target tujuan, 3 (tiga) indicator dan target kinerja utama, serta dengan 10 (sepuluh) indikator indicator dan target kinerja tambahan. Dengan kata lain terdapat 14 (empat belas) indicator dan target kinerja Tahun 2025.

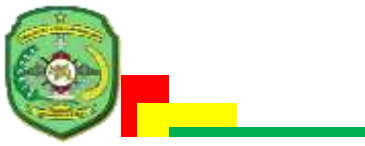
Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 jika dibandingkan dengan data awal atau capaian kinerja pada tahun 2021 serta dengan target akhir dari Renstra perangkat daerah Kecamatan Muara Jawa tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel 2.7
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL		TARGET		TARGET AKHIR RENSTR A
			SATUAN	2021	SATUAN	2025	2026
	TUJUAN						
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang	Indeks Kepuasan	Nilai	59,87	Nilai	65	67



NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL		TARGET		TARGET AKHIR RENSTR A
			SATUAN	2021	SATUAN	2025	2026
	efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel	Pelayanan Kecamatan					
	SASARAN						
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	50	Persen	70	75
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	82,35	Persen	84	85
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan	Persen	10	Persen	30	35
2	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKPJ)	N/A		Persen	100	N/A
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan	N/A		Poin	88,30	N/A



NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL		TARGET		TARGET AKHIR RENSTR A
			SATUAN	2021	SATUAN	2025	2026
		Masyarakat (IKM)				(Baik)	
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Jumlah	1	Persen	100	N/A
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	N/A		Level	3	N/A
6	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	N/A		Inovasi	1	N/A
7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporan	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporan	N/A		Persen	100	N/A
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Presentase Keterinputan Data Pada Satu Data Indonesia	N/A		Persen	100	N/A
9	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	N/A		Laporan	48	N/A
10	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	N/A		Nilai	77	N/A



NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL		TARGET		TARGET AKHIR RENSTR A
			SATUAN	2021	SATUAN	2025	2026
11	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	N/A		Nilai	65	N/A

Sumber data PK Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025

2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2025

Pada tahun Anggaran 2025 total pagu anggaran Kecamatan Muara Jawa Rp.87.304.652.801,00 yaitu yang bersumber dari APBD Murni sebesar Rp.85.704.652.801,00 dan DAU Khusus Kelurahan Rp1.600.000.000. Pada perubahan APBD Tahun 2025 total pagu anggaran Rp83.818.183.778,00 yang bersumber dari APBD Rp82.218.183.778,00 dan DAU Khusus Kelurahan Rp1.600.000.000,00. Terdapat penurunan anggaran sebesar Rp3.486.469.023,00 dikarenakan adanya hasil rekonsiliasi anggaran pada belanja pegawai dan rasionalisasi anggaran.

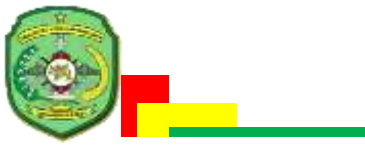
Tabel 2. 8.

Alokasi Anggaran Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Alokasi Anggaran	87.304.652.801,00	83.818.183.778,00	(3.486.469.023,00)

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025

Perencanaan pelaksanaan anggaran belanja dan setelah perubahan anggaran belanja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 dengan rincian pada tabel 2.9 berikut ini:



Tabel 2.9.

Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Belanja Operasi	56.389.780.756,11	52.718.995.326,87	(3.670.785.429,24)
Belanja Modal	30.914.872.044,89	31.099.188.451,13	184.316.406,24
Total	87.304.652.801,00	83.818.183.778,00	(3.486.469.023,00)

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025

Alokasi Anggaran per Sasaran Perencanaan pelaksanaan anggaran Tahun 2025, Kecamatan Muara Jawa mengalokasikan anggaran berdasarkan per sasaran (IKU) sebagaimana pada tabel 2.10 berikut ini:

Tabel 2. 10.

Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	87.304.652.801,00	83.818.183.778,00	(3.486.469.023,00)
Total	87.304.652.801,00	83.818.183.778,00	(3.486.469.023,00)

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025

Pada Tahun 2025, alokasi anggaran untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 sebanyak 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan dengan rincian pada tabel 2.11 berikut ini:

Tabel 2.11.

Alokasi Anggaran per Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	24.170.301.299,00	20.840.844.330,00	(3.329.456.969,00)



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5
	KABUPATEN/ KOTA			
7.01.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	605.000.000,00	181.340.540,00	(423.659.460,00)
7.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.449.312.901,00	14.831.887.435,00	(617.425.466,00)
7.01.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	280.200.000,00	233.637.500,00	(46.562.500,00)
7.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	705.511.992,00	-	(705.511.992,00)
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.557.620.000,00	1.177.079.331,00	(380.540.669,00)
7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	772.400.000,00	413.155.000,00	(359.245.000,00)
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.607.306.406,00	3.011.560.024,00	(595.746.382,00)
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1.192.950.000,00	992.184.500,00	(200.765.500,00)

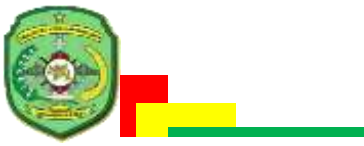


NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5
	Pemerintahan Daerah			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.359.650.000,00	40.451.441.788,00	91.791.788,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	450.000.000,00	380.121.850,00	(69.878.150,00)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	39.909.650.000,00	40.071.319.938,00	161.669.938,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.987.000.000,00	21.659.702.710,00	(327.297.290,00)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.930.000.000,00	7.104.174.460,00	(825.825.540,00)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	14.057.000.000,00	14.555.528.250,00	498.528.250,00
7.01.03	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	175.000.000,00	172.557.500,00	(2.442.500,00)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya	175.000.000,00	172.557.500,00	(2.442.500,00)



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5
	Penyelenggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	612.701.502,00	693.637.450,00	80.935.948,00
7.01.05. 2.01	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	612.701.502,00	693.637.450,00	80.935.948,00
		87.304.652.801,0	83.818.183.778,00	(3.486.469.023,0 0)

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025



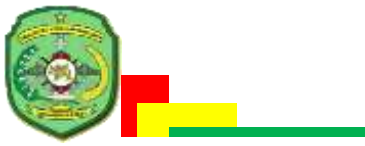
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai kartanegara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai kartanegara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai kartanegara.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Kecamatan Muara Jawa dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

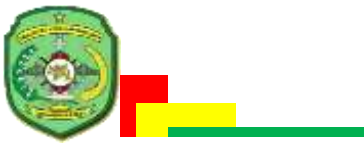
Tabel 3.1

Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai kartanegara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi



dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Muara Jawa.

3.1 Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Kecamatan Muara Jawa juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Muara Jawa tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025

	TUJUAN/SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			KRITERIA PENILAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI DUKUNG (LINK DRIVE)	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG
					TARGET	REALISASI	%CAPAIAN						
I	INDIKATOR TUJUAN												
I	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel	I	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	65	88,31	135,86	Sangat Tinggi	Realisasi/Target x 100%	Pelaksanaan SKM Tahun 2025	Tidak ada	https://drive.google.com/file/d/1btHxzOdVWHF1K2Af5623etWugY3UkRxG/view?usp=drive_link	B.2. Kec. Muara Jawa_Laporan IKM 2025
A	INDIKATOR KINERJA UTAMA												



	TUJUAN/SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			KRITERIA PENILAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI DUKUNG (LINK DRIVE)	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG
					TARGET	REALISASI	%CAPAIAN						
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	A.1	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	84	96,49	114,87	Sangat Tinggi	Realisasi/Target x 100%	Dukungan pimpinan dalam hal penanganan keluhan masyarakat sangat baik	Kurangnya sosialisasi terkait pelayanan dan belum maksimalnya Sumber Daya Manusia terkait IT	https://drive.google.com/file/d/10LVFLDXQhfZOGOAZSk9pP793TXgU2pE2/view?usp=drive_link	A.1. KEC. MUARA JAWA LAPORAN KASITRANTIBUM 31 DES 2025



	TUJUAN/SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			KRITERIA PENILAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI DUKUNG (LINK DRIVE)	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG
					TARGET	REALISASI	%CAPAIAN						
2		A.2	Presentase keluhan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	70	100	142,86	Sangat Tinggi	Realisasi/Target x 100%	Dukungan dari pihak Kelurahan dan Desa dalam menyampaikan Laporan Bulanan.	Belum maksimalnya dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan - kegiatan penanganan Kamtibmas	https://drive.google.com/file/d/1Af-Umxmc-X0byPBYZiqnGHvpkBGJWoq8/view?usp=drive_link	A.2. KEC. MUARA JAWA_REKAP TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN KELUHAN MASYARAKAT TAHUN 2025



	TUJUAN/SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			KRITERIA PENILAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI DUKUNG (LINK DRIVE)	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG
					TARGET	REALISASI	%CAPAIAN						
3		A.3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan	Persen	30	N/A	N/A	Tidak diperhitungkan	Realisasi/Target x 100%	Tidak lagi diperhitungkan sejak adanya Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan bangunan gedung, penerbitan ijin secara online melalui	Tidak ada	https://drive.google.com/file/d/1L2lvYo-lpsqXxIk1tSiE8QdfwQ0sjtvx/view?usp=drive_link	A.3. PERBUP NO 40 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG_DASAR PENGHAPUSAN IKU PAD DI KECAMATAN



	TUJUAN/SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			KRITERIA PENILAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI DUKUNG (LINK DRIVE)	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG
					TARGET	REALISASI	%CAPAIAN						
										aplikasi simbg.pu.go.id sehingga tidak ada lagi penerbitan IMB dan pemungutan retribusi di Kecamatan			
B	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN												
1	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan	B.1	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Realisasi/Target x 100%	Tersedia Faslit Sarana, prasarana dan SDM kecamatan	Tidak ada	https://drive.google.com/file/d/1abPD3S9BuFhESnbn9Is9xuH5KZJYHMRf/view?usp=drive_link	B.1. KEC. MUARA JAWA LAPORAN FORUM KONSULTASI



	TUJUAN/SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			KRITERIA PENILAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI DUKUNG (LINK DRIVE)	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG
					TARGET	REALISASI	%CAPAIAN						
	Forum Konsultasi Publik		Konsultasi Publik (FKP)										PUBLIK TAHUN 2025
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	B.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)	88,31	100,011	Sangat Tinggi	Realisasi/Target x 100%	Pelaksanaan SKM Tahun 2025	Tidak ada	https://drive.google.com/file/d/1btHxzOdVWHF1K2Af5623etWugY3UkRxG/view?usp=drive_link	B.2. Kec. Muara Jawa_Laporan IKM 2025
3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	B.3	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Realisasi/Target x 100%	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK telah selesai ditindak Lanjuti.	Tidak ada	https://drive.google.com/file/d/1MsZmWFbVNJ3gpIhjq91Z9QIGIM5DIxQq/view?usp=drive_link	B.3. KEC. MUARA JAWA_FINAL LAPORAN TLHP INSTRUKSI BUPATI ATAS TEMUAN BPK_31 OKT 2025



	TUJUAN/SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			KRITERIA PENILAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI DUKUNG (LINK DRIVE)	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG
					TARGET	REALISASI	%CAPAIAN						
4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	B.4	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	3	100	Sangat Tinggi	Realisasi/Target x 100%	Laporan Maturitas SPIP pada perangkat Daerah	Tidak ada	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A8URS6OZHrZD5RsS-XWGMLFoHjzSwEUj/edit?usp=drive_link&ouid=116727914240405216763&rtppof=true&sd=true	B.4. KEC. MUARA JAWA_KK PM SPIP Pemda_07052 025_V Terbaru
5	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	B.5	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	0	0	Sangat Rendah	Realisasi/Target x 100%	Tidak ada	Tidak terpenuhinya kelengkapan administrasi	https://drive.google.com/file/d/1KImlKouky4kSR8-ssNC7hU3N_H0HCna8/view?usp=drive_link	B.5. Kec. Muara Jawa_Dokumen Inovasi Tahun 2025
6	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	B.6	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Realisasi/Target x 100%	Tersedianya Fasilitas Sarana, prasarana dan SDM kecamatan	Tidak ada	https://drive.google.com/file/d/1OjgWauALW98CsbNzc2FR9UMGIGHeiOFe/view?usp=drive_link	B.6. KEC. MUARA JAWA_REKAP SP4N LAPOR 2025



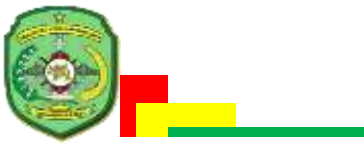
	TUJUAN/SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			KRITERIA PENILAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI DUKUNG (LINK DRIVE)	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG
					TARGET	REALISASI	%CAPAIAN						
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	B.7	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Realisasi/Target x 100%	Data Input Tahun 2024 dan 2025	Ketepatan waktu penyampaian data dari kelurahan dan desa kecamatan	https://drive.google.com/file/d/1RDwsEykie4fSee6MpBruQM7kfXRvhXV5/view?usp=drive_link	B.7. Rekap Walidata Kecamatan 20 Feb 2026_08.15 Wita
												https://drive.google.com/file/d/1K0H4Zd3vBLj3tfY1399oJfqqwdYfkRc/view?usp=drive_link	B.7. Kec. Muara Jawa_Berita Acara Inputan SDI 2024
8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	B.8	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48	100	Sangat Tinggi	Realisasi/Target x 100%	Tersedianya sarana dan media pembelajaran	Minimnya tenaga pengajar dan anggaran pembayarannya tenaga pengajar	https://drive.google.com/file/d/1rhqqnF9EaFgvlG09PmJRJ00wD0zxhT/view?usp=sharing	B.8. KEC. MUARA JAWA LAPORAN PELAKSANAAN GEMA 2025



	TUJUAN/SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			KRITERIA PENILAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI DUKUNG (LINK DRIVE)	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG
					TARGET	REALISASI	%CAPAIAN						
9	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B.9	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	66,71	86,64	Tinggi	Realisasi/Target x 100%	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Nomor B/417/AA.05/2024	Target Pemkab	https://drive.google.com/file/d/1z5h-mO7iDbjni tEFRb6SYocFrRWTz/view?usp=drive link	B.9. LHE SAKIP KUKAR 2025.pdf
10	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	B.10	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71,51 (BB)	110,02	Sangat Tinggi	Realisasi/Target x 100%	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Nomor	Target Pemkab	https://drive.google.com/file/d/1EOhWlMT7CVPOthkioHUz5sWJbo3UYSn/view?usp=drive link	B.10. LHE RB KUKAR 2024 (Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Nomor B/282/RB.06/2025)



	TUJUAN/SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			KRITERIA PENILAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI DUKUNG (LINK DRIVE)	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG
					TARGET	REALISASI	%CAPAIAN						
									B/282/RB. 06/2025				



Berdasarkan Renstra Kecamatan Muara Jawa Tahun 2021-2026 Kecamatan Muara Jawa memiliki 1 (satu) sasaran Renstra 3 (tiga) indikator utama sasaran dan pada tahun 2025 Kecamatan Muara Jawa memiliki 1 (Satu) sasaran Renstra 3 (tiga) Indikator Utama dan sasaran tambahan 10 (sepuluh), indikator tambahan yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut.. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang dilakukan, capaian indikator kinerja dapat dikategorikan sebagai berikut:

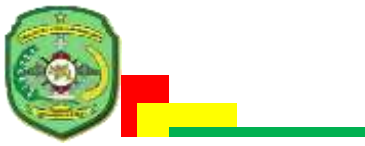
- a) Capaian kinerja $91\% \leq 100\%$ kategori “sangat Tinggi ” sebanyak 11 Indikator, atau 78,57 %;
- b) Capaian kinerja $76\% \leq 90\%$ kategori “Tinggi” sebanyak 1 Indikator, atau 7,14 %;
- c) Capaian kinerja $66\% \leq 75\%$ kategori “Sedang” sebanyak 0 Indikator, atau 0 %;
- d) Capaian kinerja $51\% \leq 65\%$ kategori “Rendah” sebanyak 0 Indikator, atau 0 %.
- e) Capaian kinerja $\leq 50\%$ kategori “Sangat Rendah” sebanyak 1 Indikator, atau 7,14%
- f) Dan 1 indikator yang tidak diperhitungkan karena Perubahan peraturan hukum, atau 7,14%

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

I. Indikator Kinerja Tujuan Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 “Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan”.

Salah satu indikasi pemerintahan yang baik adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik yang akan diambil oleh pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator / agen pembangunan. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menilai (evaluation) atau umpan balik (feedback) terhadap semua bentuk aplikasi atau penerapan (implementation) kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang diambil. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan.

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009



tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

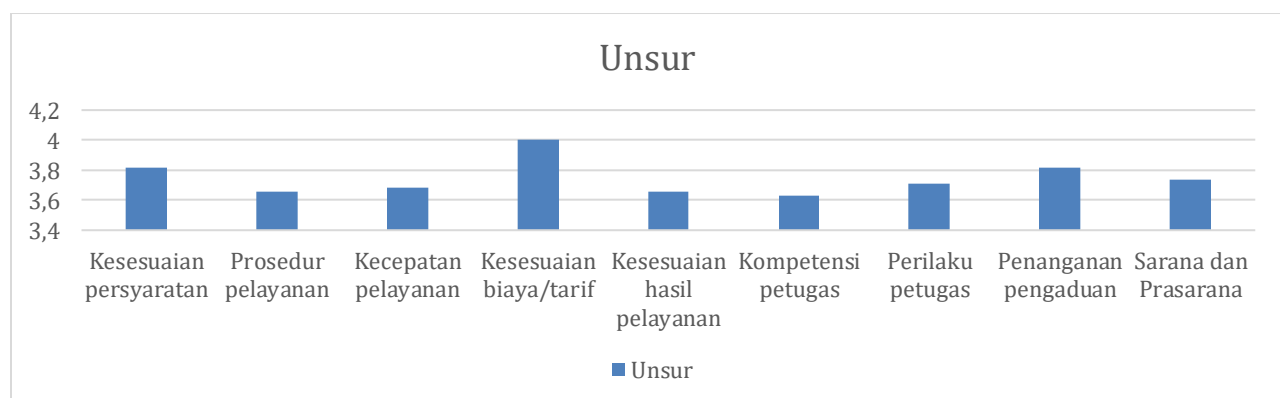
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada tahun 2025 dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala likert. Pada skala likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Pelaksanaan kegiatan survey berlangsung pada bulan Januari dan Desember Tahun 2025 (1 Tahun) terhadap seluruh bidang Pelayanan dan dilaporkan sebanyak 1 kali setahun. Sampel yang digunakan yaitu dengan memberikan kuesioner kepada Responden yang mendapatkan pelayanan pada unit pelayanan Kantor Camat Muara Jawa pada bulan pelaksanaan survey.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dimana pelayanan yang harus diukur, yaitu :

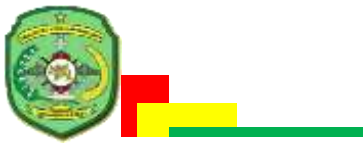
1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya / Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksanaan
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan
9. Sarana dan Prasarana

Sebanyak 1086 responden menjadi sampel dalam pelaksanaan survey atas 12 jenis pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Muara Jawa Bulan Januari s/d September 2025, dengan hasil survey sebagai berikut :

**Grafik 3.1 Nilai SKM Per Unsur
Di Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025**



Sumber data: Laporan IKM Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025.

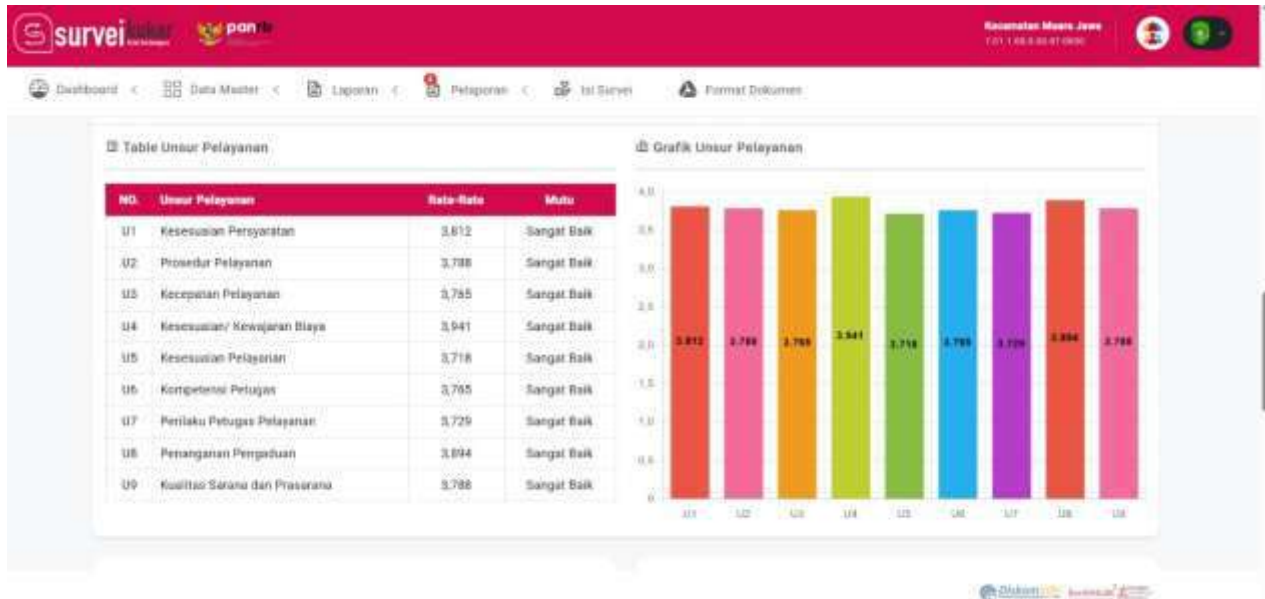


Secara rinci, hasil survey kepuasan Masyarakat per unsur per jenis layanan di Kecamatan Muara Jawa dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Indeks Kepuasan Masyarakat per Jenis Layanan
Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025

No.	Jenis Layanan	Jumlah Respon- den	Persyar- atan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perila- ku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1.	REGISTRASI PENGANTAR SKCK	782	3,46	3,47	3,45	3,61	3,51	3,52	3,57	3,63	3,60	3,54
2.	Penerbitan KK	49	3,55	3,46	3,50	3,60	3,44	3,53	3,56	3,66	3,56	3,54
3.	PEMBUATAN SURAT KETERANGAN UNTUK KESALAHAN NAMA DI KARTU KELUARGA DAN KTP	15	3,47	3,56	3,57	3,56	3,58	3,67	3,59	3,61	3,64	3,58
4.	PEMBUATAN KARTU KUNING (AK-1)	77	3,48	3,47	3,46	3,50	3,47	3,49	3,49	3,50	3,47	3,48
5.	PEMBUATAN SURAT REKOMENDASI IZIN KERAMAIAAN	4	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83
6.	PEMBUATAN SURAT KETERANGAN UNTUK BANTUAN	2	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
	SOSIAL, PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN											
7.	REGISTRASI SURAT KETERANGAN WARIS	6	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
8.	REGISTRASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)	13	3,50	3,57	3,50	3,83	3,50	4,00	3,67	3,50	3,50	3,63
9.	PEMBUATAN DISPENSASI NIKAH	7	3,50	3,50	3,50	3,83	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,54
10.	PEMBUATAN SURAT PINDAH	5	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
11.	Legalisir Surat Tanah (SKPT)	1	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
12.	Rekomendasi kelompok nelayan	1	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Rerata IKM Per Unsur			3,50	3,52	3,50	3,58	3,51	3,57	3,54	3,54	3,53	3,53
Rerata IKM Per Unsur			87,60	87,94	87,81	89,61	87,68	89,14	89,45	89,52	89,23	88,31
IKM Unit Layanan			88,31									
Mutu Unit Layanan			A									

Berdasarkan Tabel 3.3 Indikator Kinerja Tujuan “Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan” pada 2025 memperoleh nilai 88,31 dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 135,86% sehingga target kinerja tercapai. Hal-hal yang membuat target kinerja tercapai/Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dikarenakan unit pelayanan Kantor Camat Muara Jawa terus membenahi, memperbaiki serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.



Secara lebih detail Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 melalui aplikasi <https://survei.kukarkab.go.id/login> dapat dilihat melalui link https://drive.google.com/file/d/1btHxzOdVWHFIK2Af5623etWugY3UkRxG/view?usp=drive_link

Faktor yang mendukung keberhasilan capaian indikator tujuan tersebut adalah:

1. Adanya SOP Bagian Pelayanan Umum dan aplikasi pendukung pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat yang dilakukan;
2. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur pelaksana pemberian pelayanan kepada masyarakat baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

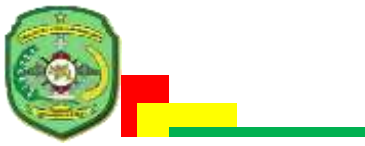
Sedangkan solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilaksanakan untuk mempertahankan capaian indikator tujuan adalah:

1. Komitmen menjalankan SOP Pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
2. Upaya-upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur;
3. Upaya-upaya pemeliharaan dan/atau pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan;
4. Ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Kecamatan Muara Jawa.

A. Indikator Kinerja Utama Sasaran Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025

A.1 Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Target Indikator Kinerja Utama Sasaran ke-1 adalah “Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum” adalah 84% dan realisasi 96,49%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 114,87% dengan predikat Sangat Tinggi.



Nilai capaian ini diperoleh dari penanganan dan tindak lanjut atas aduan masyarakat serta kejadian-kejadian terkait keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum. Capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4

Realisasi Indikator Sasaran Utama A1 “ Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum” Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025

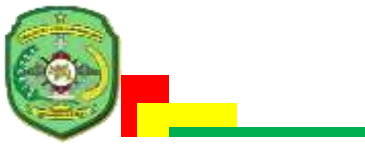
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	84	96,49	114,87%

Sumber data: Laporan Kasi Trantibum Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025

Angka realisasi sebesar 96,49% diperoleh dari jumlah laporan atau aduan terkait trantibum yang berhasil ditindaklanjuti sebesar 55 kasus dibagi total jumlah laporan atau aduan terkait trantibum sebanyak 57 kasus. Lebih detail perhitungan tersebut dapat dilihat melalui link https://drive.google.com/file/d/1mE_dSddlkJtcsDCaCrDGn65VBFT1_qHU/view?usp=drive_link

Faktor yang mendukung keberhasilan capaian indikator sasaran utama tersebut tidak berbeda jauh dengan faktor pendukung keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran utama ke-1 tersebut adalah:

1. Pelaksanaan SOP Bagian Keamanan dan Ketertiban serta perlindungan masyarakat;
2. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Adanya koordinasi dengan Polsek dan Danramil Kecamatan Muara Jawa dalam menjaga keamanan, ketertiban dan suasana kondusif di Kecamatan Muara Jawa.
5. Kerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menjaga suasana harmoni antar warga



Sedangkan solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilaksanakan untuk mempertahankan capaian indikator kinerja sasaran utama ke-1 tersebut adalah:

1. Komitmen menjalankan SOP Pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
2. Upaya-upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur;
3. Upaya-upaya pemeliharaan dan/atau pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Polsek dan Danramil Kecamatan Muara Jawa dalam menjaga keamanan, ketertiban dan suasana kondusif di Kecamatan Muara Jawa.
5. Meningkatkan Kerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menjaga suasana harmoni antar warga.
6. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan secara mandiri melalui pelaksanaan siskamling.

Data dukung penjelasan capaian indikator kinerja sasaran utama ke-1 secara rinci dapat dilihat pada Laporan Kepala Seksi Trantibum Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 pada link berikut ini :

https://drive.google.com/file/d/10LVFLDXQhfZQGQAZSk9pP793TXgU2pE2/view?usp=drive_link

A.2 Presentase keluhan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang ditindaklanjuti.

Target Kinerja “ Indikator Kinerja Sasaran Utama ke-2” tahun 2025 yaitu 70% dan realisasi 100% dan atau capaian kinerja yang diperoleh sebesar 142,86%, sehingga target kinerja tercapai dan termasuk Predikat “Sangat Tinggi” .

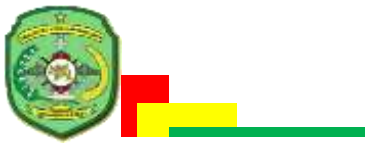
Tabel 3.5

Realisasi Indikator kinerja Utama A2

“Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti “ Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Nilai	70	100	142,86%

Sumber data : Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025



Lebih detail capaian persentase keluhan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan dapat dilihat dari Rekap Tindak Lanjut atas Laporan Keluhan Masyarakat Tahun 2025, melalui link https://drive.google.com/file/d/1Af-Umxmc-X0byPBYZiqnGHvpkBGJWq8/view?usp=drive_link

A.3 Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan.

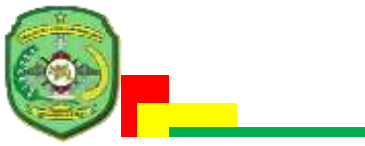
Target Tahun 2025 untuk indikator kinerja sasaran utama ke-3 yaitu Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Muara Jawa sebesar 30%. Namun sejak tahun 2022 target tersebut tidak tercapai dan tidak diperhitungkan dalam pengukuran capaian kinerja Kecamatan Muara Jawa karena tidak ada lagi pendapatan asli kewenangan kecamatan berupa retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini berdasarkan kepada Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 40 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan bangunan gedung, penerbitan ijin secara online melalui aplikasi simbg.pu.go.id sehingga tidak ada lagi penerbitan IMB dan pemungutan retribusinya di Kecamatan. Peraturan Bupati tersebut dapat diakses melalui link https://drive.google.com/file/d/1L2lvYo-lpsqXxlk1tSiE8QdfwQ0sjtvx/view?usp=drive_link

Secara detail, capaian Indikator Sasaran Utama ke-3 dapat dilihat pada tabel 3.6

Tabel 3.6 Realisasi Indikator kinerja Utama A3
“Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti “ Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan	Persen	30	N/A	N/A

Demikian penjabaran terkait target dan capaian Indikator Tujuan serta Sasaran Utama Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Indikator Sasaran Tambahan sebanyak 10 Indikator.



B. Indikator Kinerja Sasaran Tambahan Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025

B.1 Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP).

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025 di Kecamatan Muara Jawa berupa sosialisasi terkait Penyusunan/penyempurnaan Standar Operasional Prosedu (SOP) Pengaduan Masyarakat, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025. Dengan terlaksananya FKP tersebut, maka target indikator kinerja sasaran tambahan B.1 sebesar 100% telah terealisasi 100% dengan capaian indikator kinerja 100% dan predikat Sangat Tinggi.

**Tabel 3.7 Realisasi Indikator kinerja Tambahan B.1
“Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum
Konsultasi Publik (FKP) “ Tahun 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100

Sumber data: Laporan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025.

Untuk selanjutnya Pemerintah Kecamatan Muara Jawa perlu meningkatkan kegiatan-kegiatan Forum Konsultasi Publik untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan serta program kerja yang dimiliki oleh Kecamatan Muara Jawa untuk mencapai sasaran perangkat daerah yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel. Tangkapan layar bukti dukung dan dokumen Bukti dukung atas Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2025 dapat diakses melalui link:

https://drive.google.com/file/d/1abPD3S9BuFhESnbn9Is9xuH5KZJYHMRF/view?usp=drive_link

B.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

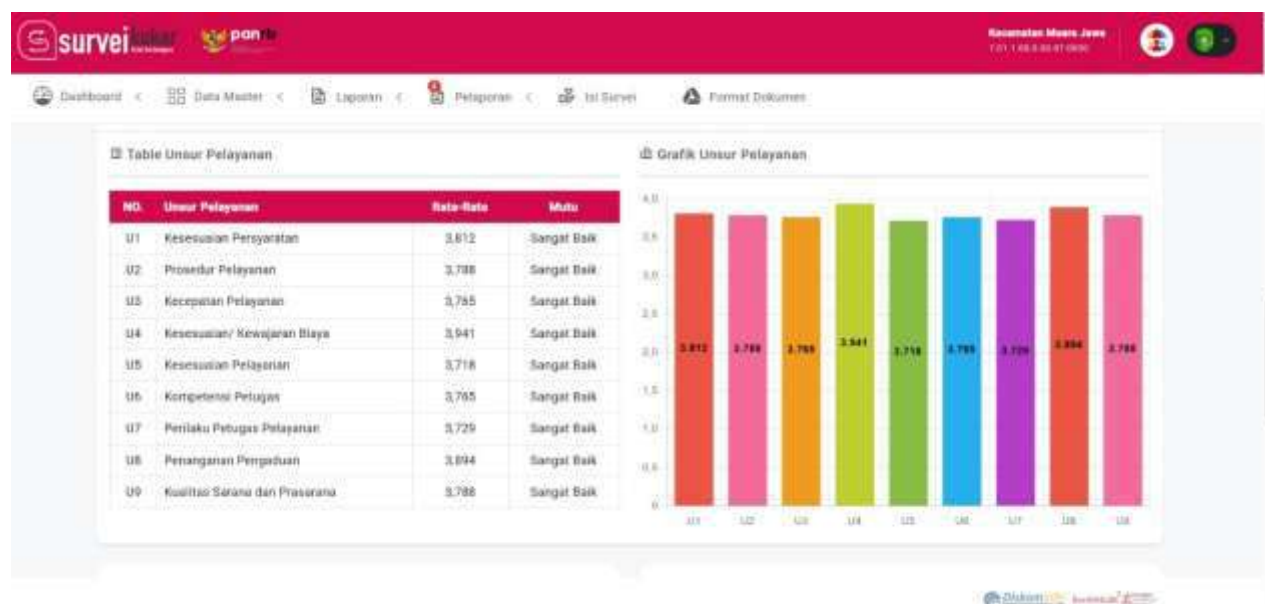
Target indikator kinerja sasaran tambahan B.2 sebesar 88,30% dengan realisasi sebesar 88,31%. Capaian indikator kinerja tambahan sebesar 100,01% dengan predikat Sangat Tinggi. Penyusunan dan Pelaporan SKM Tahun 2025 telah dilaksanakan tepat waktu.

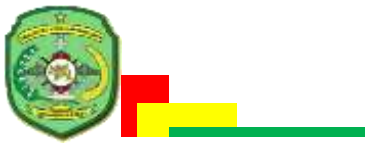
**Tabel 3.8 Realisasi Indikator kinerja Tambahan B.2
“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) “ Tahun 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	88,30	88,31	100,01

Sumber data: Laporan IKM Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025.

Faktor Pendukung adalah Kemudahan persyaratan, Prosedur pelayanan, Kecepatan pelayanan, Keseuaian Pelayanan, Kompetensi Petugas, Sikap/Perilaku Petugas Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Kualitas Sarana dan Prasarana. Sedangkan faktor Penghambat berupa kurangnya kesadaran Masyarakat dalam mengisi IKM secara Digital yaitu informasi yang di dapat masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan kurangnya SDM pada petugas dalam memberikan pelayanan.





Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 beserta Rencana Tindaklanjutnya dapat diakses melalui link sebagai berikut:

https://drive.google.com/file/d/1btHxzOdVWHFIK2Af5623etWugY3UkRxG/view?usp=drive_link

B.3 Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2025 Kecamatan Muara Jawa mendapatkan proses audit dari BPK atas Paket-Paket Pekerjaan Tahun 2025. Dan dari hasil audit tersebut terdapat beberapa tindak lanjut yang harus dilakukan yaitu mengikuti Instruksi Bupati Kutai Kartanegara Nomor P-2688/ITDA/700/05/2025 Tanggal 26 Mei 2025 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah Kabuapten Kutai Kartanegara Tahun 2024. Beberapa Langkah telah dilakukan berupa:

1. Menerbitkan surat instruksi dari Camat Muara Jawa kepada Ppkom dan PPTK kegiatan untuk lebih cermat dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan dan mengendalikan paket-paket pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Mengisntruksikan kepada pihak rekanan untuk segera melakukan pengembalian kelebihan pembayaran belanja atas beberapa paket yang diaudit.

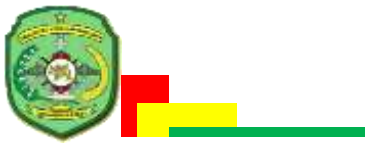
Seluruh rekomendasi tindaklanjut telah diselesaikan oleh Pemerintah Kecamatan Muara Jawa pada tahun 2025, sehingga target indicator B.3 terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 100%.

Tabel 3.9 Realisasi Indikator kinerja Tambahan B.3

“Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya “

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100	100

Sumber data: Kec. Muara Jawa_Final Laporan Tlhp Instruksi Bupati Atas Temuan Bpk_31 Okt 2025



Dokumen bukti dukung capaian indikator kinerja B.3 dapat diakses melalui link :
https://drive.google.com/file/d/1MsZmWFbVnJ3gpIhjq91Z9QIGIM5DlxQq/view?usp=drive_link

B.4 Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah.

Target indikator kinerja sasaran tambahan B.4 beserta realisasi dan capaian kerjanya dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Realisasi Indikator kinerja Tambahan B.4
“Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah “

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	3	100

Faktor pendukung pencapaian target kinerja indicator tambahan B.4 adalah adanya Target waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, pendampingan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah dan Inspektorat kabupaten Kutai Kartanegara serta komiten Kecamatan Muara Jawa. Pemerintah Kecamatan Muara Jawa perlu menjaga kualitas pelaksanaan SPIP agar sasaran perangkat daerah yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel dapat tercapai. Tangkapan layar bukti dukung dan dokumen Bukti dukung dapat diakses melalui link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A8URS6OZHrZD5RsS-XWGMLFoHjzSwEUj/edit?usp=drive_link&ouid=116727914240405216763&rtpof=true&sd=true

B.5 Jumlah Inovasi Perangkat Daerah

Pada tahun 2025, Kecamatan Muara Jawa tidak memiliki inovasi yang memenuhi syarat administrasi dan diunggah pada web <https://inovasi.kukarkab.go.id/>

Sehingga target indikator kinerja sasaran B.5 sebesar 1 inovasi tidak tercapai, dan berdampak pada capaian kinerja 0%.

Tabel 3.11
Realisasi Indikator kinerja Tambahan B.5
“Jumlah Inovasi Perangkat Daerah “

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	0	0

B.6 Tindak lanjut pengaduan SP4N Lapor

Target indikator kinerja sasaran tambahan B.6 sebesar 100% dengan realisasi 100% sehingga capaian indikator kinerja sangat tinggi sebesar 100%. Aplikasi SP4AN LAPOR Kecamatan Muara Jawa aktif setiap saat namun tidak ada laporan / pengaduan menggunakan aplikasi tersebut. Kecamatan Muara Jawa perlu melakukan sosialisasi tentang aplikasi ini. Bukti dukung dapat dilihat melalui link: https://drive.google.com/file/d/1OjgWauALW98CsbNzc2FR9UMGIGHeiOFe/view?usp=drive_link

Tabel 3.12
Realisasi Indikator kinerja Tambahan B.6
“Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor “

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100



REKAPITULASI SP4N LAPOR
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2025
KANTOR KECAMATAN CAMAT MUARA JAWA

NO	BULAN	NAMA/ALAMAT YANG MENGAJUKAN KELUHAN	URAIAN KELUHAN	HASIL TINDAK LANJUT PENAGANAN	HAMBATAN
1	JANUARI	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	FEBRUARI	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	MARET	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	APRIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5	MEI	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
6	JUNI	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
7	JULI	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
8	AGUSTUS	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
9	SEPTEMBER	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
10	OKTOBER	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
11	NOVEMBER	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
12	DESEMBER	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



 CAMAT MUARA JAWA



MUHAMMAD RAMLI, SE, MM

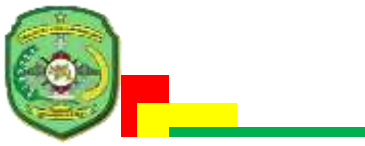
 NIP. 197506042000121003

B.7 Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia

Target Kinerja Tambahan Indikator Kinerja ke-7 Tahun 2025 sebesar 100% target realisasi 100% dan Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Indonesia mencapai 100% dengan kriteria penilaian “Sangat Tinggi” sebagaimana disajikan pada gambar berikut:

Tabel 3.13
Realisasi Indikator kinerja Tambahan B.7
“Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia“

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100



Secara terinci Laporan Pelaksanaan Gerakan Etam Mengaji Tahun 2025 di Kecamatan Muara Jawa dapat diakses pada link :

<https://drive.google.com/file/d/1rhqqnF9EaFgvIeGO9PmJRJ-00wD0zxt/view?usp=sharing>

B.9 Nilai SAKIP Kabupaten

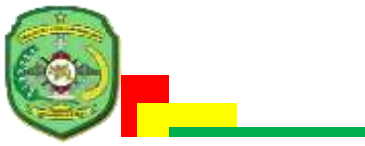
Target Kinerja Tambahan “Indikator Kinerja Ke-9” tahun 2025 sebesar 77. Nilai Realisasi 66,71 dan Nilai Capaian Kinerja 86,64%, dengan Kriteria Penilaian Tinggi. Target, realisasi, dan capaian dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut ini.

Tabel 3.15
Realisasi Indikator kinerja Tambahan B.9
“Nilai SAKIP Kabupaten“

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	66,71	86,64

Penilaian ini Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2025 nomor : B/402/AA.05/2025 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa nilai sebesar 66,71 dengan predikat “B” hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “BAIK”, yaitu implentasi AKIP seudah baik pada pemerintah daerah dan Sebagian unit kerja utama, namun perlu adanya Upaya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Surat Permenpan RB tersebut dapat diakses melalui link :

https://drive.google.com/file/d/1z5h-mO_7iDbjn_i_tEFRb6SYocFrRWTz/view?usp=drive_link



B.10 Indeks RB Kabupaten

Target Kinerja Tambahan “Indikator Kinerja Ke10” tahun 2025 sebesar 65. Nilai Realisasi 71,51 dan Nilai Capaian Kinerja 110,02%, dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi. Target, realisasi, dan capaian dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut ini.

Tabel 3.16
Realisasi Indikator kinerja Tambahan B.10
“Indeks RB Kabupaten “

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71,51	110,02

Target Kinerja Tambahan “Indikator Kinerja Ke-10” tahun 2025 sebesar 65 Nilai Realisasi 71,51 Nilai Capaian Kinerja 110% dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi. Penilaian ini Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 25 April 2025 Nomor : B/282/RB.06/2025 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Indeks RB Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah 71,51 dengan kategori “BB”. Surat Permenpan RB tersebut dapat diakses melalui link :

https://drive.google.com/file/d/1EQhWl_MT7CVPOthkioHUz5sWJbo3UYSn/view?usp=drive_link

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Perangkat Daerah

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :



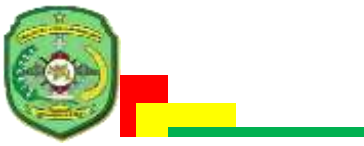
Tabel 3.17

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja
Sebelumnya

NO	TUJUAN/ SASARAN	K O D E	INDIKA TOR KINERJ A	SAT UA N	2024			SAT UAN	2025			KET ERA NGA N
					TA RG ET	RE ALI SA SI	%CAP AIAN		TA RG ET	REAL ISASI	%CAP AIAN	
INDIKATOR TUJUAN												
I	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel	I	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	64	91,76	143,38%	Nilai	65	88,31	135,86	Menurun

Target Indikator Tujuan Kecamatan Muara Jawa yaitu Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel. Realisasi kinerja Tujuan Kantor Camat Muara Jawa tahun 2025 diperoleh Nilai Indeks Kepuasan sebesar 88,31% dengan tingkat capaian 135,86%. Bila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2024) dengan nilai indeks kepuasan sebesar 91,76% dengan tingkat capaian 143,38%, Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Muara Jawa mengalami penurunan. Adapun faktor pendukung dan kendala yang dihadapi unit pelayanan Kantor Camat Muara Jawa yaitu hal ini disebabkan unit pelayanan Kecamatan Muara Jawa terus berbenah, memperbaiki sarana dan prasarana serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan lebih efisien.

Tentunya dengan hasil yang sudah dicapai ini tidak terlepas dari adanya hambatan yang muncul pada saat pelayanan diberikan, hambatan pada tahun 2025 yaitu sarana untuk perlengkapan penunjang belum tersedia dengan lengkap dan sumber daya manusia yang belum kompeten sehingga pelayanan tidak maksimal, alat cetak KTP sering terjadi kerusakan, dan terputusnya jaringan komunikasi dan



internet yang ada, serta adanya pemadaman listrik karena kerusakan dan lain sebagainya. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.18

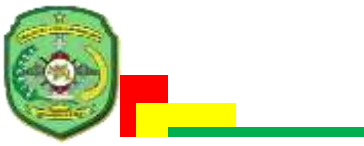
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

N o	SASARAN	INDIKA TOR	SATU AN	TAH UN	TARG ET	REALIS ASI	KETERAN GAN	CAPAI AN KINER JA	KETERAN GAN
1	Meningka tkan kualitas pelayanan kecamata n yang efektif, efisien, inovatif, transpara n dan akuntabel	Indeks Kepuasa n Pelayana n Kecamat an	Nilai	2021	59,87	0	Tidak dilakukan Survey	0,00%	Tidak dilakukan Survey
				2022	61	104,12	Meningkat	170,69 %	Meningkat
				2023	62	89,73	Menurun	144,73 %	Menurun
				2024	64	91,76	Meningkat	143,38 %	Menurun
				2025	65	88,31	Meningkat	135,86 %	Menurun

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Realisasi target kinerja sasaran Kantor Camat Muara Jawa tahun 2025 jika dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya terjadi sedikit penurunan. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang menjadi target kinerja Kecamatan Muara Jawa pada tahun 2025 ini dan ada 10 (sepuluh) indikator kinerja tambahan yang menjadi target tambahan sesuai dengan Perjanjian Kinerja kepala Perangkat Daerah. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya (tahun 2024) secara rinci

Karena indikator tambahan setiap tahun ada perubahan sehingga tidak semua capaian kinerja tahun 2025 bisa dibandingkan sama dengan capaian kinerja tahun 2024. Berikut Rekapitulasi Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.19

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja
Tahun Sebelumnya

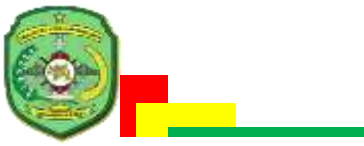
NO	TUJUAN /SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024			SATUAN	2025			KETERANGAN
					TARGET	REALISASI	%CAPAIAN		TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	
A INDIKATOR KINERJA UTAMA												
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	A.1	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Per sen	84	100	119,05%	Per sen	84	96,49	114,87%	Menurun
2		A.2	Persentase keluhan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Per sen	65	100	153,85%	Per sen	70	100	142,86%	Menurun
3		A.3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan	Per sen	25	N/A	N/A	Per sen	30	N/A	N/A	Tidak diperhitungkan
B INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN												
1	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam	B.1	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak	Per sen	100	100	100,00%	Per sen	100	100	100,00%	Tetap



NO	TUJUAN /SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024			SATUAN	2025			KETERANGAN
					TARGET	REALISASI	%CAPAIAN		TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	
	pelaksanaan Forum Konsultasi Publik		Lanjutan hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)									
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	B.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	100	91,76	91,76%	Poin	88,30 (Baik)	88,31	100,01%	Meningkat
3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	B.3	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	84,86	84,86%	Persen	100	100	100,00%	Meningkat
4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	B.4	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	100	100	100,00%	Level	3	3	100,00%	Tetap
5	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan	B.5	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	100	100	100,00%	Inovasi	1	0	0,00%	Menurun



NO	TUJUAN /SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024			SATUAN	2025			KETERANGAN
					TARGET	REALISASI	%CAPAIAN		TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	
	Inovasi Daerah											
6	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	B.6	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase	100	100	100	Persentase	100	100	100,00%	Tetap
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	B.7	Persentase Keterintipan Data pada Satu Data Indonesia	Persentase	100	100	100	Persentase	100	100	100,00%	Tetap
8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	B.8	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	1	1	100,00%	Laporan	48	48	100,00%	Tetap
9	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B.9	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	73	70,1	96,03	Nilai	77	66,71	86,64%	Menurun



NO	TUJUAN /SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024			SATUAN	2025			KETERANGAN
					TARGET	REALISASI	%CAPAIAN		TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	
10	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	B.10	Indeks RB Kabupaten	Nilai	64	60,12	93,94	Nilai	65	71,51 (BB)	110,02%	Meningkat

3.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Muara Jawa periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.20

Perbandingan Antara Target Renstra dan Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			KRITERIA PENILAIAN
					TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	
INDIKATOR TUJUAN								
I	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif,	I	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	65	88,31	135,86	Sangat Tinggi



NO	TUJUAN/SARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			KRITERIA PENILAIAN
					TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	
	efisien, inovatif, transparan dan akuntabel							
A	INDIKATOR KINERJA UTAMA							
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	A.1	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase	84	96,49	114,87	Sangat Tinggi
2		A.2	Persentase keluhan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	70	100	142,86	Sangat Tinggi
3		A.3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan	Persentase	30	N/A	N/A	Tidak diperhitungkan
B	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN							
1	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam	B.1	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum	Persentase	100	100	100,00	Sangat Tinggi



NO	TUJUAN/SARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			KRITERIA PENILAIAN
					TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	
	pelaksanaan Forum Konsultasi Publik		Konsultasi Publik (FKP)					
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	B.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)	88,31	100,011	Sangat Tinggi
3	Menyelesaikan Tindakan Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	B.3	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persentase	100	100	100,00	Sangat Tinggi
4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	B.4	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	3	100	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	B.5	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	0	0	Sangat Rendah
6	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	B.6	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase	100	100	100	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya Penyelenggara	B.7	Persentase Keterinputan Data pada	Persentase	100	100	100	Sangat Tinggi



NO	TUJUAN/SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			KRITERIA PENILAIAN
					TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	
	aan Satu Data Indonesia		Satu Data Indonesia					
8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	B.8	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48	100	Sangat Tinggi
9	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B.9	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	66,71	86,64	Tinggi
10	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	B.10	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71,51 (BB)	110,02	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas, jika dilihat capaian realisasi kinerja Kecamatan Muara Jawa terhadap target akhir rencana strategis (renstra) tahun 2026 secara keseluruhan mendapat rata-rata kriteria penilaian sangat tinggi, walaupun ada 1 (satu) indikator kinerja sasaran utama yaitu Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan yang tidak diperhitungkan karena sejak adanya Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan bangunan gedung, penerbitan ijin secara online melalui aplikasi simbg.pu.go.id sehingga tidak ada lagi penerbitan IMB dan pemungutan retribusinya di Kecamatan.



Serta 1 (satu) indikator kinerja tambahan sasaran yaitu Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang sangat rendah karena tidak terlaksana. Hal ini karena pada tahun 2025 tidak ada Inovasi dari Kecamatan Muara Jawa yang diunggah pada aplikasi milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupa Sistem Informasi Riset dan Inovasi Berbasis Elektronik.

3.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Realisasi target kinerja Tujuan Kecamatan Muara Jawa pada semester 2 tahun 2025 yaitu sebesar 88,31. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam predikat Sangat Baik. Tentunya masih ada kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Muara dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jika dibandingkan dengan nilai IKM yang ada pada kecamatan lain di wilayah Indonesia untuk tahun 2025 yaitu Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai IKM sebesar 98,80 dengan predikat Sangat Baik, maka realisasi kinerja tujuan Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 masih berada di bawah realisasi kinerja tujuan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Link web Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025.

Tabel 3.21

Perbandingan Nilai IKM Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 dengan Kecamatan Lain di Tingkat Nasional

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	88,31	98,80	89%

Data yang digunakan sebagai pembanding capaian kinerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 adalah Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Krian Periode 01 Januari - 30 Juli 2025. Lebih lengkap Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Krian dapat diakses melalui link: [https://drive.google.com/file/d/1WULOguB7j6Q-Y6hfhDzE47ouxzA7-FWy/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1WULOguB7j6Q-Y6hfhDzE47ouxzA7-FWy/view?usp=drive_link)



3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis (Renstra) Kecamatan Muara Jawa periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.22

Tingkat Kemajuan Capaian Rencana Strategis Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=5/4*100
	TUJUAN				
I	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	65	88,31	135,86
	SASARAN				
A.1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	84	96,49	114,87%
A.2		Presentase keluhan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang ditindaklanjuti	70	100	142,86%
A.3		Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan	30	N/A	N/A
B.1	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil	100	100	100,00%



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=5/4*100
	Forum Konsultasi Publik	Forum Konsultasi Publik (FKP)			
B.2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,30 (Baik)	88,31	100,01%
B.3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	100	100	100,00%
B.4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	3	3	100,00%
B.5	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	0	0,00%
B.6	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	100	100	100,00%
B.7	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	100	100	100,00%
B.8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	48	48	100,00%
B.9	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	77	66,71	86,64%



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=5/4*100
B.10	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	65	71,51 (BB)	110,02%

Dalam Upaya pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran tahun 2025 tentunya terdapat faktor pendukung dan penghambat. Kedua hal tersebut tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.23

Faktor Pendukung Dan Penghambat Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			KRITERIA PENILAIAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT
					TARGET	REALISASI	%CAPAIAN			
INDIKATOR TUJUAN										
I	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel	I	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	65	88,31	135,86	Sangat Tinggi	Pelaksanaan SKM Tahun 2025	Tidak ada



NO	TUJUAN/ SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			KRITERIA PENILAIAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT
					TARGET	REALISASI	%CA PAIAN			
A	INDIKATOR KINERJA UTAMA									
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	A.1	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	84	96,49	114,87	Sangat Tinggi	Dukungan pimpinan dalam hal penanganan keluhan masyarakat sangat baik	Kurangnya sosialisasi terkait pelayanan dan belum maksimalnya Sumber Daya Manusia terkait IT
2		A.2	Presentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	70	100	142,86	Sangat Tinggi	Dukungan dari pihak Kelurahan dan Desa dalam menyampaikan Laporan Bulanan.	Belum maksimalnya dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan penangan Kamtibmas



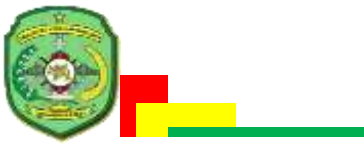
NO	TUJUAN/ SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			KRITERIA PENILAIAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT
					TARGET	REALISASI	%CAPAIAN			
3		A.3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Kewenangan Kecamatan	Persen	30	N/A	N/A	Tidak diperhitungkan	Tidak lagi diperhitungkan sejak adanya Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan bangunan gedung, penerbitan ijin secara online melalui aplikasi simbg.pu.go.id sehingga tidak ada lagi penerbitan IMB dan pemungutan retribusi di Kecamatan	Tidak ada



NO	TUJUAN/ SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			KRITERIA PENILAIAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT
					TARGET	REALISASI	%CA PAIAN			
B	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN									
1	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	B.1	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Tersedianya Fasilitas Sarana, prasarana dan SDM kecamatan	Tidak ada
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	B.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)	88,31	100,011	Sangat Tinggi	Pelaksanaan SKM Tahun 2025	Tidak ada
3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	B.3	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK telah selesai ditindak Lanjuti.	Tidak ada
4	Maturitas Sistem Pengenda	B.4	Nilai Maturitas	Level	3	3	100	Sangat Tinggi	Laporan Maturitas SPIP pada	Tidak ada



NO	TUJUAN/ SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			KRITERIA PENILAIAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT
					TARGET	REALISASI	%CAPAIAN			
	lian Intern Pemerintah (SPIP)		SPIP pada Perangkat daerah						perangkat Daerah	
5	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	B.5	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	0	0	Sangat Rendah	Tidak ada	Tidak terpenuhinya kelengkapan administrasi
6	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporan	B.6	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Tersedianya Fasilitas Sarana, prasarana dan SDM kecamatan	Tidak ada
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	B.7	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	Data Input Tahun 2024 dan 2025	Ketepatan waktu penyiapan data dari kelurahan dan desa ke kecamatan



NO	TUJUAN/ SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			KRITERIA PENILAIAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT
					TARGET	REALISASI	%CAPAIAN			
8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	B.8	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48	100	Sangat Tinggi	Tersedianya sarana dan media pembelajaran	Minimnya tenaga pengajar dan anggaran pembayaran tenaga pengajar
9	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B.9	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	66,71	86,64	Tinggi	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Nomor B/417/A.A.05/2024	Target Pemkab
10	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih	B.10	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71,51 (BB)	110,02	Sangat Tinggi	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Nomor B/282/R.B.06/2025	Target Pemkab



NO	TUJUAN/ SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			KRITERIA PENILAIAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG	PENJELASAN FAKTOR PENGHAMBAT
					TARGET	REALISASI	%CAPAIAN			
	dan melayani									

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber dihitung dengan membandingkan antara capaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan untuk pencapaian target kinerja tersebut. Penghitungan Tingkat efisiensi diperoleh dengan cara membagi capaian realisasi kinerja dengan capaian realisasi anggaran, dan kategori penilaian yaitu :

- Efisien, jika Tingkat efisiensi lebih dari 1.
- Tidak efisien, jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1.
- Impas, tingkat efisiensi sama dengan 1.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian sasaran indikator kinerja utama dan sasaran indikator kinerja tambahan dan persentase penyerapan anggaran dan rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.24 berikut :



Tabel 3.24

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Kinerja dan anggaran program Tahun 2025

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan		
		Uraian	Target	Realisasi		Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			Persentase Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=6/9	11		
7.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Nilai	57,51	Nilai	88,48%	20.840.844.330	18.011.556.746	86,42%	1,02	Efisien namun serapan anggaran tidak mencapai target 90% karena tidak terealisasi per 31 Desember 2025 dan menjadi utang
7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanaka	85	Persen	100	Persen	117,65%	380.121.850	321.640.050	84,61%	1,39	Efisien namun serapan anggaran tidak mencapai target 90% karena tidak terealisasi per 31 Desember



NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja						Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
		Uraian	Target		Realisasi		Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		n sesuai SOP									2025 dan menjadi utang	
		Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	87,5	Persen	100	Persen	114,29%	40.071.319.938	30.986.736.777	77,33%	1,48	Efisien namun serapan anggaran tidak mencapai target 90% karena tidak terealisasi per 31 Desember 2025 dan menjadi utang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	100	Persen	100	Persen	100,00%	21.659.702.710	18.333.243.748	84,64%	1,18	Efisien namun serapan anggaran tidak mencapai target 90% karena



NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan		
		Uraian	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=6/9	11		
	DESA DAN KELURAHAN	Desa/Kelurahan yang aktif								tidak terealisasi per 31 Desember 2025 dan menjadi utang		
7.01.03	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	100	Persen	100	Persen	100,00%	172.557.500	74.250.000	43,03%	2,32	Efisien namun serapan anggaran tidak mencapai target 90% karena tidak terealisasi per 31 Desember 2025 dan menjadi utang



NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja						Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
		Uraian	Target		Realisasi		Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan										
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	100	Persen	100,00%	693.637.450	628.991.550	90,68%	1,10	Efisien

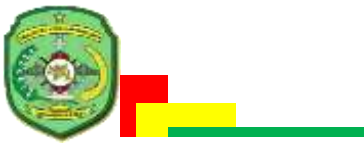
Keterangan:



Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka tidak efisien

Jika tingkat efisiensi sama dengan 1, maka impas

Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari 1, maka efisien



Berdasarkan tabel 3.24 tersebut Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran program tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

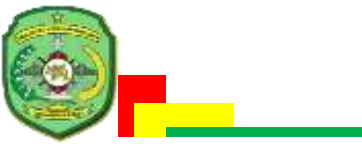
1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota tahun 2025 yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 65 nilai dan realisasi target di tahun 2025 mendapat penilaian sebesar 57,51 Kategori CC (Cukup/memadai). Target kinerja yang sudah ditentukan belum tercapai, dengan Capaian kinerja sebesar 88,48%. Belum tercapainya target kinerja tersebut disebabkan oleh:

- a. Sasaran perjanjian kinerja yang tidak relevan tersebut tidak memiliki keterkaitan antara program/kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah;
- b. Perjanjian kinerja belum selaras dengan dokumen perencanaan perangkat daerah baik jangka menengah maupun jangka pendek;
- c. Dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek perangkat daerah belum menyajikan informasi atas ketidak tercapaian target pada periode sebelumnya dan belum mengungkapkan penjelasan atau analisa yang mendalam dan komprehensif;
- d. pengukuran kinerja yang dilakukan oleh perangkat daerah belum sepenuhnya berdasarkan hasil kinerja yang dilaksanakan;
- e. Laporan Kinerja telah disusun sesuai kaidah yang berlaku, namun belum melalui pembahasan yang dapat dilakukan dengan pelaksanaan rapat yang dihadiri oleh pimpinan sebagai bukti keterlibatan dan perhatian pimpinan;
- f. kualitas tim evaluator internal masih perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan keterlibatan dalam hal implementasi SAKIP;
- g. Proses evaluasi kinerja internal perangkat daerah belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik dan belum dilaksanakan secara periodik

Untuk memperbaiki kinerja, hal-hal yang perlu dilakukan oleh Kecamatan Muara Jawa sesuai rekomendasi dari Evaluator SAKIP Inspektorat Kabupaten Kutai kartanegara adalah:

1. Memperbaiki kualitas Pohon Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021;
2. Perbaiki kualitas Perjanjian Kinerja sehingga benar-benar merepresentasikan kinerja Perangkat Daerah dalam hal sasaran dan indikator, dan jika terjadi perubahan target agar dilakukan penyesuaian pada Dokumen Perencanaan terkait;



3. Perbaiki kualitas dokumen perencanaan kinerja terutama dalam hal penyajian informasi dan analisis penyebab tidak tercapainya target secara memadai;
4. Melengkapi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan manual IKU yang memuat sekurang-kurangnya deskripsi indikator, definisi operasional, formulasi perhitungan indikator dan sumber data;
5. Menyusun SOP terkait pelaporan dan pengukuran kinerja menggunakan aplikasi e-Pantau;
6. Menyusun dokumen kerangka acuan kerja perubahan untuk setiap kegiatan-kegiatan yang berasal atau mengalami penambahan/perubahan anggaran;
7. Melakukan dan mendokumentasikan pelaksanaan rapat pembahasan penyusunan dokumen LKjIP yang dihadiri oleh pimpinan terkait;
8. Meningkatkan kompetensi dan keterlibatan tim evaluator internal dalam hal evaluasi dan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah;
9. Mendokumentasikan seluruh proses evaluasi kinerja internal perangkat daerah secara periodik.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Indikator kinerja Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik tahun 2025 yaitu indikator pertama Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan sesuai SOP dengan target kinerja sebesar 85% dan indikator kedua Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan dengan target kinerja 87,5%. Di tahun 2025 target kinerja program tercapai sesuai target, ini dikarenakan pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Muara Jawa semuanya sudah sesuai SOP dan standar pelayanan publik. Hasil ini didapat dari hasil survey yang diadakan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan baik itu perizinan atau pun non perijinan. Hasil survey diolah sesuai standar perhitungan Indeks Kepuasan masyarakat dengan memenuhi berbagai kriteria penilaian.

Kendala yang dihadapi selama tahun 2025 yaitu belum maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat seperti jaringan internet yang terkadang terganggu sehingga berdampak pada tidak terselesaikannya pelayanan dokumen kependudukan, belum tersedianya sarana prasarana bagi penyandang disabilitas di Kantor Camat Muara Jawa; belum optimalnya Tingkat kompetensi petugas loket pelayanan; belum maksimalnya penggunaan aplikasi SP4N Lapor.



3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan tahun 2025 yaitu Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif dengan target sebesar 100%. Target kinerja pada tahun ini tercapai sebesar 100% dikarenakan seluruh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang ada seperti Karang Taruna, LPM, PKK, Posyandu, RT, Pokjanal, Linmas, Lembaga Adat dan beberapa lembaga lainnya, semuanya aktif dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2025.

4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Indikator kinerja Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum tahun 2025 yaitu Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan dengan target 100% dan realisasi kinerja program 100%. Persentase realisasi kinerja program 100% dan target kinerja tercapai, diharapkan lebih aktif dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2025 yaitu Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja sebesar 100 % dan realisasi kinerja program 100%. Persentase realisasi kinerja program 100% dan target kinerja tercapai, diharapkan kecamatan, kelurahan dan desa lebih aktif dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

3.1.7 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Realisasi anggaran program/kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Muara Jawa dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 81,55%, adapun realisasi anggaran program dan kegiatan tahun 2025 dapat dilihat lebih rinci pada tabel 3.25 di bawah ini:



Tabel 3.25

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Perse ntase Capaian	Sisa Anggaran	Keterangan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.840.844.330	18.011.556.746	86,42 %	2.829.287.584,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	181.340.540	101.449.900	55,94 %	79.890.640,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.831.887.435	13.593.978.552	91,65 %	1.237.908.883,00	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	233.637.500	58.705.000	25,13 %	174.932.500,00	Terdapat utang kepada pihak ketiga
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.177.079.331	755.004.795	64,14 %	422.074.536,00	Terdapat utang kepada pihak ketiga
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	413.155.000	140.087.340	33,91 %	273.067.660,00	Terdapat utang kepada pihak ketiga
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.011.560.024	2.749.141.115	91,29 %	262.418.909,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	992.184.500	613.190.044	61,80 %	378.994.456,00	Terdapat utang kepada pihak ketiga
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.451.441.788	31.308.376.827	77,40 %	9.143.064.961	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Perse ntase Capai an	Sisa Anggaran	Keterangan
7.01.02 .2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	380.121.850	321.640.050	84,61 %	58.481.800,00	Terdapat utang kepada pihak ketiga
7.01.02 .2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	40.071.319.938	30.986.736.777	77,33 %	9.084.583.160,75	Terdapat utang kepada pihak ketiga
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.659.702.710	18.333.243.748	84,64 %	3.326.458.962,00	
7.01.03 .2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.104.174.460	4.131.775.748	58,16 %	2.972.398.712,00	Terdapat utang kepada pihak ketiga
7.01.03 .2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	14.555.528.250	14.201.468.000	97,57 %	354.060.250,00	
7.01.03	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	172.557.500	74.250.000	43,03 %	98.307.500,00	
7.01.04 .2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	172.557.500	74.250.000	43,03 %	98.307.500,00	Terdapat utang kepada pihak ketiga
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	693.637.450	628.991.550	90,68 %	64.645.900,00	
7.01.05 .2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	693.637.450	628.991.550	90,68 %	64.645.900,00	



NO	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Perse ntase Capai an	Sisa Anggaran	Keterangan
	Penugasan Kepala Daerah					
	JUMLAH	83.818.183. 778	68.356.418. 871	81,55 %	15.461.764. 907	

Dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar 94,70%, maka realisasi anggaran tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 13,15% yang disebabkan oleh:

1. Menurunnya anggaran tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp. 13.310.047.240,25 dari Rp. 97.128.231.018,00 menjadi Rp.83.818.183.777,75, atau turun sebesar 13,70%;
2. Timbulnya utang/kewajiban sebesar Rp.11.968.267.093,- yang etrdiri atas utang kepada pihak ketiga sebesar Rp.11.857.997.093,- dan bukan kepada pihak ketiga (berupa belanja pengadaan hadiah lomba dan biaya perjalanan dinas) sebesar Rp.110.270.000,-. Utang ini timbul karena sampai tanggal 31 Desember 2025 terjadi kekurangan dana pada Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga 187 berkas permohonan pencairan anggaran Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 tidak terealisasi pembayarannya.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Muara Jawa dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2025 Kecamatan Muara Jawa menetapkan sebanyak 1 tujuan, 1 sasaran utama dengan 3 indikator dan 10 sasaran tambahan dengan 10 indikator kinerja sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Perubahan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 135,86% dengan kategori Sangat Tinggi.
- Sasaran utama 1 terdiri dari 3 indikator kinerja utama dengan capaian kinerja sebesar 114,87% dan 142,86% dengan kategori Sangat Tinggi. Sedangkan 1 indikator tidak diperhitungkan sejak tahun 2022.
- Sasaran tambahan 10 terdiri dari 10 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 89,67% kategori Tinggi.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 14 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

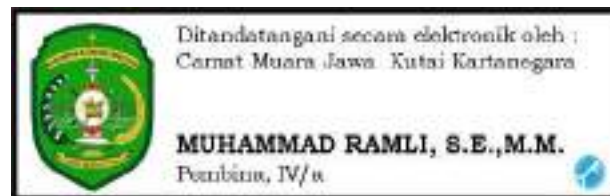
Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai kartanegara Kecamatan Muara Jawa dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.83.818.183.778,00 sedangkan



realisasi anggaran mencapai Rp.68.356.418.871,00 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 81,55%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten/Kota.

Kutai Kartanegara, 28 Februari 2026





LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA 2025



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN MUARA JAWA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD RAMLI, S.E., M.M.**

Jabatan : **CAMAT**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes.**

Jabatan : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya bertugas.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;

6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 7 November 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes.

Pihak Pertama,
CAMAT



MUHAMMAD RAMLI, S.E., M.M.
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197506042000121003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN MUARA JAWA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	84
		Presentase keluhan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	70
2.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
4.	Menyelesaikan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD tahun sebelumnya	Persen	100
5.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
6.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
7.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
8.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
9.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di prangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
10.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
11.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65

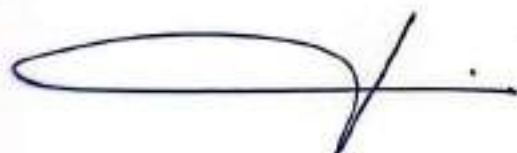
**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN MUARA JAWA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.840.844.330,00	APBD-P
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.451.441.788,00	APBD-P
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.659.702.710,00	APBD-P
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	172.557.500,00	APBD-P
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	693.637.450,00	APBD-P
	JUMLAH ANGGARAN	83.818.183.778,00	APBD-P

Kutai Kartanegara, 7 November 2025

Pihak Kedua,

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes.

Pihak Pertama,

CAMAT



MUHAMMAD RAMLI, S.E., M.M.

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197506042000121003



SELAMAT DATANG DI
KANTOR KECAMATAN MUARA JAWA